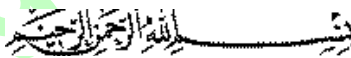




Salinan

PUTUSAN

Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

NIK., tempat
tanggal lahir Jakarta, 30 Mei 2001, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (No.Hp
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), sebagai

Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

NIK., tempat
tanggal lahir Jakarta, 04 Agustus 1993, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal
di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2 Mei 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dibawah Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU. tertanggal 2 Mei 2024 yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari hal 16 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 06 Juni 2017);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (L), lahir Jakarta, 18 November 2017 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (L), lahir Bogor, 17 November 2021;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran seperti ditonjok, ditampar didaerah wajah;
 - b. Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu bermain judi dan juga mengkonsumsi minum-minuman keras;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam

Hal 2 dari hal 16 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak-anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L), lahir Jakarta, 18 November 2017 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L), lahir Bogor, 17 November 2021 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*/hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L), lahir Jakarta, 18 November 2017 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L), lahir Bogor, 17 November 2021 untuk keperluan perubahan administrasi Kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 30 April 2024, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menerangkan bahwa Keluarga yang tidak mampu akan mengurus Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara;
10. Bahwa Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal 3 dari hal 16 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L), lahir Jakarta, 18 November 2017 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L), lahir Bogor, 17 November 2021 berada dibawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang permohonan izin prodeo Penggugat untuk membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dari perkara ini sebagaimana Penetapan Katua Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 495/KPA.W9-A5/SK.HK2.6/V/2024 tertanggal 5 Mei 2024 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 391/SEK.01.W9-A5/SK.HK2.6/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 005.04.2.400623/2024, karenanya perkara yang diajukan Penggugat dapat diperiksa ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara Surat Panggilan (relaas) Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU. tanggal 7 Mei 2024 dan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU. tanggal 14 Mei 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan

Hal 4 dari hal 16 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipersidangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan;

A. Surat:

- B. Saksi:

- Hal 5 dari hal 16 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mempunyai 2 orang
anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat
hidup rukun, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat
sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan
Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu bermain judi dan juga
mengonsumsi minum-minuman keras dan bila bertengkar
Tergugat suka memukul Penggugat seperti yang terlihat di
pipinya merah bekas memukul;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah
hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun
kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
Penggugat dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat
dengan baik;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah
sumpahny telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena
saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mempunyai 2 orang
anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat
hidup rukun, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat
sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan
Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu bermain judi dan juga
mengonsumsi minum-minuman keras dan bila bertengkar
Tergugat suka memukul Penggugat seperti yang terlihat di
pipinya merah bekas memukul;

Hal 6 dari hal 16 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat dengan baik;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikannya putusan;

Bahwa untuk memperisingskat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara Surat Panggilan (relaas) Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU. tanggal 7 Mei 2024 dan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU. tanggal 14 Mei 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak

Hal 7 dari hal 16 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dimediasi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran seperti ditonjok, ditampar didaerah wajah dan Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu bermain judi dan juga mengkonsumsi minuman keras, sehingga puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020 akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., yang sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat yang mengalaskan permohonan cerainya didasarkan pada adanya sering berselisihan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal 8 dari hal 16 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi. Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 06 Juni 2017, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan merupakan Para Pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2 tentang fotocopi Akta Kalaahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 18 November 2017, yang dikelurkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka membuktikan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.3 tentang fotocopi Akta Kalaahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 17 November 2021, yang dikelurkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka membuktikan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama Sutinah binti Atim dan saksi 2 bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan

Hal 9 dari hal 16 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu bermain judi dan juga mengonsumsi minum-minuman keras dan bila bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat seperti yang terlihat di pipinya merah bekas memukul, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah 06 Juni 2017 dan selama berumah tangga hingga sekarang mempunyai dua orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu bermain judi dan juga mengonsumsi minum-minuman keras dan bila bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat seperti yang terlihat di pipinya merah bekas memukul;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang terbukti atas dasar keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan sering berselisih sejak tahun 2018

Hal 10 dari hal 16 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu bermain judi dan juga mengkonsumsi minum-minuman keras dan bila bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat seperti yang terlihat di pipinya merah bekas memukul, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa selain Penggugat dan Tergugat terbukti sering berselisih yang terus menerus, namun juga terbukti sebagaimana dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi diatas Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun, maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agam angka 1 Hukum Perkawinan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.", dalam perkara *a quo* terbuktinya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal belum selama paling singkat 6 (enam) bulan, namun Penggugat dapat membuktikan yang didasarkan atas keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat telah berbuat kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana keterangan 2 (dua) orang saksi, Tergugat pernah memukul Penggugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah pecah (*broken marriage*), sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka dengan perginya Tergugat dari kediaman bersama menunjukkan hati Tergugat dan Penggugat telah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, karena tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya satu langkah dan tidak adanya satu pikiran lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal 11 dari hal 16 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda (kekuasan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. Tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi dengan baik, karena kedua belahpihak telah tidak menjalankan kewajibannya dan telah tidak lagi saling menerima haknya sebagai suami istri, yang terbukti juga telah berpisah rumah, maka berdasarkan bukti -bukti tersebut, Majelis berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahakan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkaranya dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat nomor 3 yang mengajukan agar menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 18 November 2017 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 17 November 2021 kepada

Hal 12 dari hal 16 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu dan sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah/hak asuh anak*) Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tentang tuntutan *hadhonah anak* tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat mengakui semua isi dalil gugatan Penggugat dan dianggap Tergugat tidak keberatan atas tuntutan *hadhonah* ini;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P.2 (Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), P.2 (Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakt-fakta sebagai berikut:

Bahwa bukti P.2 tentang fotocopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 18 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa bukti P.2 tentang fotocopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 17 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan dibawah sumpahnya bahwa selama ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tinggal bersama dengan Penggugat telah diurus dengan baik yang kondisinya dalam keadaan sehat, karena Penggugat sebagai ibu bertanggung jawab dan mengurusnya penuh dengan kasih sayang sebagaimana diterangkan kedua orang saksi sebagai bukti Penggugat memenuhi syarat untuk pemegang *hadhonah* atas anak tersebut;

Hal 13 dari hal 16 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pemegang hadhonah agamanya harus sama dengan anak yang diasuhnya dan sesuai dengan bukti Penggugat bergama islam sama dengan anak yang dimohon Penggugat untuk ditetapkan hadhonahnya kepada Penggugat;

Bahwa dasar hak pemegang hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz hak ibunya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 18 November 2017 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 17 November 2021, dalam katagori belum mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan dan pengasuhan menjadi hak ibu (Penggugat) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan agar anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 18 November 2017 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 17 November 2021 ditetapkan dan diasuh pada Penggugat dapat dikabulkan:

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan lingkungan Penggugat, sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa bila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak sebagai ayah kandungnya, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pelno Kamar,

Hal 14 dari hal 16 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhonah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang tuntutan Penggugat nomor 3 agar Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara karena Penggugat menyatakan termasuk orang yang tidak mampu (miskin), maka berdasarkan Penetapan Katua Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 495/KPA.W9-A5/SK.HK2.6/V/2024 tertanggal 5 Mei 2024 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 391/SEK.01.W9-A5/SK.HK2.6/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 005.04.2.400623/2024 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tidak dibebankan kepada Penggugat, melainkan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2024;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 18 November 2017 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 17 November 2021, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat hingga berumur 21 tahun, dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam

Hal 15 dari hal 16 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pendidikan terhadap anak tersebut diatas, selama tidak mengganggu kepentingan pendidikan anak tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2024;

Demikian ditetapkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal Senin tanggal 20 Mei 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqa'idah* 1445 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Syamsul Bahri,M.H. dan Dra.Hj.Rogayah,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.Syamsul Bahrai,M.H.

Ttd

Dra.Hj.Rogayah,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya : -

Hal 16 dari hal 16 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.JU.